

**DINAMIKA STRUKTUR DAN KULTUR AGRARIA  
PETANI PADA BERBAGAI ZONA AGROEKOSISTEM  
DI KABUPATEN BANDUNG**  
(Kasus di Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Nagreg dan  
Kecamatan Lembang)

Oleh:  
**Iwan Setiawan, Sp., MSi**  
NIP. 132 206 502



**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG**  
2006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan petani dan lahan (baca: agraria) bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Jika baik dan bernilai positif di satu sisi maka berlaku pula untuk sisi yang lain, begitu juga sebaliknya. Hingga kini, di Indonesia, lahan dan petani menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Secara spasial, permasalahan lahan terjadi di semua tempat, baik di kota maupun di pedesaan, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Kecenderungannya, sekarang ini, permasalahan lahan dan petani semakin kompleks, menyangkut kultur dan struktur. Selain konflik, permasalahan lahan juga menyangkut penguasaan, penggunaan, pengusahaan, pemilikan, pengelolaan produktivitas dan keberlanjutan.

Bagi pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama dan unik, karena tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, bagi pertanian yang bersifat *land base agricultural* ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak atau keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kebijakan pangan nasional, menyangkut terjaminnya pangan (*food availability*), ketahanan pangan (*food security*), akses pangan (*food accessibility*), kualitas pangan (*food quality*) dan keamanan pangan (*food safety*).

Pesatnya pembangunan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan investasi, bagai pisau bermata dua. Di satu sisi terbukti mampu memacu angka pertumbuhan ekonomi, di sisi lain telah meningkatkan konversi pada lahan-lahan pertanian produktif. Celakanya, dari tahun ke tahun, konversi atau alih fungsi lahan pertanian di Indonesia terus meningkat dan sulit dikendalikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat intensitas kegiatan ekonomi tinggi.

Di sisi lain, tekanan terhadap lahan juga berwujud penyempitan rata-rata penguasaan lahan oleh petani, baik sebagai implikasi pewarisan maupun berbagi pengusahaan dan kemiskinan (*shared poverty*). Keadaan tersebut jelas semakin mempertajam ketidakkondusifan suasana bagi keberlangsungan pertanian dan perwujudan kebijakan pangan nasional dalam jangka panjang, apalagi pembukaan areal

baru sangat terbatas dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus melaju. Sebagai gambaran, luas rata-rata kepemilikan lahan sawah di Jawa dan Bali hanya 0,34 ha per rumah tangga petani. Secara nasional jumlah petani gurem (petani dengan luas lahan < 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003, dengan rata-rata peningkatan sekitar 2,4 persen per tahun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2005).

Secara sosial-ekonomi, tekanan terhadap lahan juga terjadi karena pola pikir masyarakat didalam memperlakukan lahan telah bergeser dari hubungan timbal balaik (*reciprocal*) ke arah eksploitasi (*economic maximization*). Implikasinya, petani begitu permisif didalam pemberian pupuk kimia, melepas (menjual) lahan, menyewakan atau menyerahkan pengelolaannya kepada buruh tani atau petani lain dan sebagainya. Selain itu, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dengan nonpertanian. Nasoetion dan Winoto (1996) menegaskan bahwa jika hanya berpatokan pada nilai ekonomi sewa lahan (*land rent economics*), maka pertanian akan selalu dikalahkan oleh industri dan perumahan.

Secara faktual, alih fungsi lahan pertanian (terutama sawah) tidak hanya berdampak pada penurunan kapasitas produksi pangan, tetapi juga merupakan wujud pemubadziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi atau budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turun atau tidak beranjaknya kesejahteraan petani (Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air, 2006).

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang 20 tahun lalu terkenal sebagai lumbung padi bagi Kota Bandung. Lahan sawahnya terhampar di dataran rendah Cekungan Bandung. Lahan kering sebagai pusat pengembangan jagung, ubi kayu dan palawija lainnya membentang di dataran medium Cekungan Bandung. Sedangkan dataran tingginya yang meliputi satuan kerucut gunung api di bagian utara dan selatan Cekungan Bandung terkenal sebagai sentra produksi sayuran yang tidak diragukan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

Kini, lahan-lahan pertanian di Kabupaten Bandung telah mengalami banyak perubahan, baik dalam penggunaan, pengelolaan, penguasaan, pengusahaan maupun kepemilikan. Kecenderungannya, beban, tekanan dan permasalahan petani dan agraria di

Kabupaten Bandung menjadi sangat pelik. Hal ini sangat terkait dengan derasnya laju pembangunan sektor industri, pemukiman, fasilitas umum, infrastruktur jalan dan sebagainya. Apalagi, beberapa wilayah di Kabupaten Bandung dijadikan sebagai kawasan Industri dan pemukiman terpadu. Agraria di Kabupaten Bandung juga tidak luput dari konflik, terutama dalam alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lain dan tuntutan pengelolaan lahan negara, perkebunan dan lahan kritis.

Jika secara fisik saja lahan pertanian telah mengalami konversi, maka sudah dipastikan bahwa masyarakat petani di Kabupaten Bandung pun mengalami perubahan dalam aspek sosial budayanya. Ada kecenderungan, lahan pertanian di Kabupaten Bandung telah mengalami kejenuhan yang sangat tinggi (*leveling-off*). Di Kabupaten Bandung juga terjadi ketimpangan penguasaan lahan pertanian pada berbagai zona agroekosistem antara petani kaya dengan petani kecil dan antara pemilik lokal dengan pemilik guntai (terutama orang kota). Di sisi lain, lahan-lahan pertanian semakin rentan banjir, kekeringan, erosi, pencemaran, penurunan produktivitas dan penyempitan penguasaan maupun pengusaha.

Secara kuantitatif, baik di zona agroekosistem sawah, lahan kering maupun dataran tinggi, sebagian besar (75 persen) lahan pertanian dikuasai oleh sebagian kecil (25 persen) petani. Bahkan, menurut informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung (2006), ada sebagian kecil petani yang memiliki lahan pertanian lebih dari 30 hektar. Sedangkan sebagian besar (75 persen) petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar, bahkan kurang dari 0,25 hektar.

Secara kausalistik, terdapat ketidaksejajaran antara visi pemerintah yang menekankan pada pengkondisian kearah sentra agribisnis di Jawa Barat dengan kenyataan konversi lahan di Kabupaten Bandung. Secara sosial budaya, juga terjadi paradoks antara *image* masyarakat yang sudah mengidentikan Kabupaten Bandung sebagai sentra agribisnis dengan eskalasi pelepasan dan konversi lahan ke peruntukkan lain, terutama ke sektor industri dan pemukiman. Di sisi lain, pemerintah dan berbagai pihak terkait (perusahaan agribisnis) juga menggulirkan berbagai model pengelolaan usahatani kearah yang lebih melembaga, ekonomis dan profesional, seperti *rice estate*, *corporate farming*, *contract farming*, *agropolitan*, *sentra pengembangan*, dan sebagainya.

Secara sosial budaya, longgarnya proses pelepasan lahan juga terkait dengan tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang tata kelola lahan, meningkatnya harga tanah sebagai implikasi dari eskalasi pembangunan pusat ekonomi dan meningkatnya permintaan, meningkatnya minat penduduk Kota Bandung dan migran untuk tinggal di wilayah Kabupaten Bandung. Permasalahan lahan dan petani juga terkait dengan berkembangnya pandangan kapilaritas sosial dan tingkat migrasi masyarakat pedesaan ke kota-kota (ke sektor formal, sektor informal maupun non formal).

Permasalahan struktur tampaknya lebih dominan dibandingkan dengan masalah kultural. Nasoetion (2003) menegaskan, selama ini, berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian (terutama sawah) sudah banyak dibuat, namun implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai dari pemangku kepentingan. Kendalanya adalah koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan konsistensi perencanaan. Terkait dengan ketiganya, tidak efektifnya peraturan yang ada juga dipengaruhi oleh sistem administrasi lahan yang masih lemah, koordinasi antar lembaga terkait yang kurang kuat dan implementasi tata ruang yang belum memasyarakat.

Semua kegagalan tersebut terjadi karena upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan lahan-lahan produktif yang diterapkan bersifat parsial dan tidak ditopang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang (1) menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup, 2) mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian secara tidak terkendali, dan 3) menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

**Pertanyaannya, apakah permasalahan dan dinamika agraria di Kabupaten Bandung berbeda antara zona agroekosistem sawah, lahan kering dan dataran tinggi?**

Pertanyaan tersebut didasari oleh proposisi bahwa : 1) permasalahan dan dinamika agraria di Kabupaten Bandung sangat terkait dengan eskalasi perkotaan ke pinggiran kota dan pedesaan; dan 2) permasalahan dan dinamika agraria juga terkait dengan faktor kultur petani dan struktur yang melingkupinya. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa dampak negatif dan dampak positif dinamika agraria terhadap pola usahatani dan kesejahteraan petani? Pertanyaan kedua ini pun menarik untuk diungkap mengingat banyaknya analisis yang mensinyalir eratnya keterkaitan antara agraria dengan

kemiskinan petani. Sebagai tambahan, menarik pula untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya dinamika dan permasalahan agraria di Kabupaten Bandung? Itulah tiga pertanyaan yang hendak diungkap dan diurai secara mendalam dalam penelitian ini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan pertanyaan penelitian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika struktur dan kultur pengelolaan agraria pada petani di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana dampak dinamika struktur dan kultur agraria terhadap pola usahatani petani di Kabupaten Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan dampak dinamika agraria pada berbagai zona agroekosistem di Kabupaten Bandung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika struktur dan kultur agraria, dampak dinamika struktur dan kultur agraria terhadap pola usahatani petan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika struktur dan kultur agraria di Kabupaten Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian terkait, sebagai bahan pemikiran bagi para dosen dan praktisi agraria atau pembangunan pertanian, khususnya di Kabupaten Bandung.

## **1.5 Pendekatan Masalah**

Seperti halnya kemiskinan, masalah agraria di Indonesia terjadi karena dua faktor, yakni kultur dan struktur. Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni (1998) bahwa kondisi petani yang miskin sejatinya terjadi karena faktor struktur, yakni ketimpangan serta kecilnya rata-rata penguasaan tanah. Hasil sensus pertanian tahun 1993

menunjukkan bahwa 69 persen luas lahan pertanian yang ada dikuasai oleh 14 persen rumah tangga pedesaan, sementara pada kutub lain terdapat 43 persen rumah tangga pedesaan tidak menguasai tanah sama sekali (tunakisma).

Permasalahan agraria merupakan sebuah kontinum yang tidak terputus dalam sejarah panjang bangsa dan negara Indonesia. Permasalahan tersebut terkait dengan dimensi politik, ekonomi dan kebijakan agraria yang muncul pada suatu periode tertentu. Menurut Gunawan Wiradi (1990), Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni (1998) dan Noer Fauzi (2003) permasalahan agraria muncul dalam setiap bangunan ekonomi politik. Kecenderungannya, setiap bangunan ekonomi politik menampilkan spektrum yang berbeda. Pada masa prakolonial, dan atau feodal, pola hubungan vertikal dalam penguasaan tanah telah menimbulkan pola konflik agraria yang sifatnya vertikal dan horizontal. Pada masa kolonial, proses pengkutuban antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak telah membentuk pola konflik agraria struktural. Bentuk permasalahan agraria tersebut mengalami perubahan pada periode kemerdekaan hingga tahun 1965. Bentuk konfliknya tidak lagi bersifat struktural-vertikal, tetapi lebih bersifat horizontal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik saat itu yang bersifat pluralistik dan memberikan peluang kepada rakyat untuk terlibat dalam suatu proses politik yang relatif terbuka. Pada masa orde baru, bentuk konflik agraria kembali bersifat struktural-vertikal.

Noer Fauzi (2003) menegaskan bahwa inti soal agraria dewasa ini menyangkut masalah: 1) persoalan-persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam konteks negara dan bangsa Indonesia yang sangat kaya dengan sumber-sumber agraria berpangkal dari adanya ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang secara sengaja dibiarkan berkembang didalam kehidupan bernegara pada masa pemerintahan orde baru dengan dijalankannya politik pembangunan agraria yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan diabdikan pada keadilan sosial; 2) politik agraria yang selama ini dijalankan oleh orde baru juga telah menciptakan berkembangnya konflik-konflik dan atau sengketa agraria yang massif dan mendalam sifat kekerasannya; 3) politik pembangunan agraria yang mengandalkan penanaman dan pemupukan modal skala raksasa pada sektor-sektor pokok ekonomi yang terutama dibiayai oleh hutang luar negeri, seperti yang selama ini dijalankan, telah gagal membangun modal dalam negeri

sebagai jaminan dari keberlanjutan pembangunan; dan 4) politik sentralisme maupun sektoralisme hukum keagrariaan beserta kelembagaannya selama ini telah menghasilkan pengambilalihan sumber-sumber agraria yang menjadi hak rakyat dan terkonsentrasinya penguasaan sumber-sumber agraria, sehingga mengorbankan kemakmuran kehidupan rakyat pedesaan terutama buruh tani, petani kecil, masyarakat adat dan rakyat perkotaan yang miskin, serta mendudukkan pertanian sebagai sektor yang dikebelakangkan.

Terkait dengan pengambilan keputusan dan struktur penguasaan lahan, Dietz (1998) menegaskan bahwa pemerintah dan kaum kuat kuasa telah melakukan tiga pelanggaran terkait dengan agraria, yakni: 1) hak kepemilikan; 2) hak untuk memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya; dan 3) hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam tersebut.

Permasalahan agraria sebagaimana disinggung di atas juga bersumber dari faktor kultural. Terkait dengan faktor kultural, konsepsinya dapat diadaptasi dari strategi petani, baik dari Boeke, Geertz, Hayami dan Kikuchi, dan Palte. Dijelaskan oleh Amri Marzali (2003), bahwa Boeke yang memberi istilah "limited needs atau oriental mysticism" kepada para petani menganalisis bahwa terkait dengan pertumbuhan penduduk, sistem pewarisan yang boleh dikatakan sama rata untuk setiap anak, jelas akan menghasilkan penurunan luas tanah pertanian milik setiap keluarga, yang pada gilirannya menimbulkan kemiskinan pedesaan. Upaya paling banter adalah static expansion, yaitu memperluas daerah pertanian dengan teknologi dan sistem pembagian kerja yang tidak berubah. Sebagian dari mereka pindah dari desa asal yang sudah padat untuk membuka lahan pertanian baru dari hutan-hutan di sekitar desa lama.

Geertz (1963) mengeluarkan formula kultural yang terkenal, yakni "agricultural involution" yaitu pola-pola respon petani Jawa yang khas terhadap tekanan penduduk secara kultural, sosial, ekonomi dan ekologis, termasuk dalam merespon kelangkaan sumberdaya agraria. Situasi perumitan, penjelimitan dan pengkomplekskan ke dalam (namun dengan pola dasar yang lama) terlihat dalam setiap aspek kehidupan pertanian-perdesaan Jawa, baik dalam sistem pemilikan tanah, sistem bagi hasil, sistem hubungan kerja, sistem kesenian dan sebagainya.



Hayami dan Kikuchi (1981/1987) mengaskan bahwa tekanan penduduk terhadap lahan merupakan masalah serius di pedesaan Asia pada masa kini. Dampak negatif tekanan penduduk adalah penurunan nilai upah buruh dibandingkan keuntungan para pemilik tanah. Di sisi lain, kelas petani kaya kapitalis yang terus membeli tanah milik petani gurem ditengah meningkatnya jumlah tunakisma. Perlu dicatat, bahwa usaha tani kecil semakin bertambah banyak seiring dengan pertumbuhan tunakisma, dan usaha besar komersial yang tergantung kepada buruh bebas sangat jarang. Semua itu terjadi karena kontrak-kontrak kerja tradisional yang berdasarkan atas moral masyarakat pedesaan (seperti *bawon*) tidak berkembang kearah kontrak komersil yang impersonal, tetapi ke arah kontrak tradisional (seperti *kedokan*). Keduanya, baik petani pemilik lahan maupun buruh tani, merasa aman dan untung dengan kontrak-kontrak kerja tradisional tersebut.

Sedangkan Palte (1984) yang menganalisis berdasarkan model geografis sosial, menyatakan bahwa dalam rangka menanggulangi masalah tekanan penduduk dan ketersediaan sumber agraria, petani telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut: 1) perluasan kawasan pertanian (ekstensifikasi); 2) intensifikasi penggarapan lahan; 3) penggunaan bibit yang lebih unggul; 4) peningkatan cara-cara bertani; dan 5) membuka usaha-usaha non pertanian. Palte memfokuskan penelitiannya pada petani lahan kering di dataran tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan ketiga ahli sebelumnya lebih fokus pada petani sawah yang berbudaya hidrolik.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif (deskriptif survey method), yaitu suatu metode penelitian yang semata-mata bertujuan untuk memberikan gambaran atau memaparkan tentang sesuatu, baik situasi maupun peristiwa (Easthope, 1974; Rakhmat, 1984; dan Suhartono, 1999). Menurut Kerlinger (1986), penelitian survey mengkaji populasi (universe) yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu, untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi relatif dari variabel-variabel sosiologis dan psikologis.

Whitney dalam Nasir (1999) menguatkan bahwa dengan metode ini, kerja peneliti bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Nasir (1999) menyatakan bahwa sasaran metode ini adalah fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada, dalam mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik menyangkut institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau daerah.

#### **2.2 Data dan Instrumentasi**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan tahunan, kabupaten dalam angka, *review* hasil-hasil penelitian yang telah ada dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian, serta data-data terkait yang telah dikumpulkan oleh berbagai institusi yang terkait seperti: dinas perhubungan, dinas koperasi dan usaha kecil menengah, dinas perdagangan, dinas pertanian, BPS, dan sebagainya.

#### **2.3 Analisis Data**

Data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Selanjutnya, hasil-hasil analisis akan

dideskripsikan secara kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak dinamika agraria terhadap perubahan pola usahatani dan kesejahteraan petani akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi.

## **2.4 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada tahun 2006, suatu kondisi yang relatif masih utuh, karena belum terjadi pemekaran Bandung Barat.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Karakteristik Agroekosistem Kabupaten Bandung**

Kabupaten Bandung yang luasnya mencapai 307.370 ha, memiliki geomorfologi yang bervariasi (dataran danau, satuan pematang homoklin, dan satuan kerucut gunung api) dengan tipe iklim B1, suhu rata-rata 18°C–29°C, dan curah hujan 1450 mm/tahun. Secara alamiah, kondisi tersebut telah menyebabkan bervariasinya struktur hidrologi dan agroekosistem Kabupaten Bandung. Kecenderungannya, karakteristik sosial dan usahatani petani pun menjadi bervariasi. Keragaman geomorfologi, topografi dan hidrologi telah pula menyebabkan terbentuknya “*urban corridor*” Barat–Timur, dengan sumbu yang menghubungkan Padalarang (sebelah Barat) dan Cileunyi (sebelah Timur), dan koridor Barat Daya Soreang–Banjaran. Secara administratif, Kabupaten Bandung berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang di sebelah Timur, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta di sebelah Utara, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur di sebelah Selatan, Kabupaten Cianjur di sebelah Barat, serta Kota Bandung dan Kota Cimahi di bagian tengah (**Lampiran 4**).

Kabupaten Bandung yang terletak diantara 6°41'–7°19' LS dan 107°22'–108°5' BT, meliputi 91.68 % dari Cekungan Bandung. Rata-rata ketinggian minimum 110 m dan maksimum 2.429 m dari permukaan laut, dengan tingkat kemiringan mulai 0–8 %, 8–15 %, hingga di atas 45 %. Berdasarkan ketinggian tempat, tingkat kemiringan, dan komoditas yang banyak diusahakan, diketahui bahwa 13 kecamatan (32,56%) terletak di agroekosistem dataran tinggi berbasis sayuran, 17 kecamatan (39,53%) terletak di agroekosistem dataran medium berbasis palawija, dan 13 kecamatan (27,90%) terletak di agroekosistem sawah berbasis padi. Secara umum, tata wilayah Kabupaten Bandung cenderung menunjukkan pola radial-lateral dengan inti perkembangan tetap di Kotamadya Bandung dan Kota Cimahi, kemudian menyebar di sekitar jalan-jalan akses (pusat pertumbuhan baru) yang kemudian semakin meluas ke arah pinggiran kota dan pedesaan.

**Agroekosistem Dataran Tinggi Berbasis Sayuran** adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki geomorfologi satuan kerucut gunung api di sebelah timur laut, utara, dan

selatan Kota Bandung, yang meliputi: Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Ibun, Paseh, Cimeunyan, Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Sayuran dan teh merupakan komoditas dominan yang diusahakan di ekotipe ini. Sebagian kecil petani mengusahakan buah-buahan, palawija, dan padi beririgasi pedesaan atau tadah hujan. Sebagian besar masyarakat di ekotipe yang sangat intensif dan paling tinggi tingkat modernisasi pertaniannya ini, beretnis Sunda. Meskipun tingkat keterbukaan masyarakat di ekotipe ini sangat tinggi (kosmopolit), namun keberadaan dan keterlibatan etnis lain sangat sedikit sekali (hanya dalam kegiatan pemasaran dan penyediaan sarana produksi pertanian). Pangalengan dan Lembang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi pertanian di koridor bagian selatan dan utara Kabupaten Bandung. Secara ekologis, sebagian besar wilayah ekotipe ini berupa vegetasi hutan dan perkebunan.

**Agroekosistem Dataran Medium Berbasis Palawija** adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki geomorfologi berupa satuan pematang homoklin di sebelah barat dan perbukitan di sebelah timur Kota Bandung, yang meliputi: Cikancung, Cicalengka, **Nagreg**, Arjasari, Banjaran, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor, Batujajar, Cileunyi, Cilengkrang, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan. Sebagian besar lahan di ekotipe ini mengandalkan pengairan dari hujan (tadah hujan), oleh karena itu, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, dan padi ladang, menjadi komoditas yang banyak dikembangkan oleh petani di ekotipe ini, disamping buah-buahan dan sedikit sayuran dataran medium. Beberapa kecamatan di ekotipe ini memiliki irigasi pedesaan dan atau irigasi setengah teknis, oleh karena itu dikembangkan pula usahatani padi sawah (terutama pada sawah-sawah bertopografi miring). Namun secara ekonomis, hingga kini belum ditemukan komoditas unggulan (selain jagung) dari ekotipe ini. Sebagian besar masyarakatnya beretnis Sunda, namun karena intensitas migrasi sirkuler masyarakat ekotipe ini (terutama ke perkotaan) cukup tinggi, maka asimilasi dan akulturasi budaya dengan etnis non Sunda pun cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan ekotipe lainnya, penduduk miskin di ekotipe ini merupakan yang terbanyak (74.430 jiwa). Cicalengka, Banjaran, Cililin, Cilengkrang, Cileunyi, dan Padalarang, merupakan pusat-pusat pertumbuhan di ekotipe ini. Tingkat konversi lahan di ekotipe ini semakin meningkat seiring dengan mulai intensifnya pembangunan perumahan dan industri.

**Agroekosistem Sawah Berbasis Padi** adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki geomorfologi berupa dataran danau, yang meliputi: Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Pameungpeuk, Katapang, Soreang, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Ngamprah. Dataran rendah di Cekungan Bandung ini hampir seluruh lahannya mendapat pengairan dari irigasi teknis. Ekotipe yang dilalui oleh puluhan anak sungai Citarum ini terkenal dengan lahan sawahnya yang subur, yang sekaligus menempatkannya sebagai lumbung padi bagi Kota dan Kabupaten Bandung, disamping ikan dari kolam (empang). Secara umum, tingkat konversi lahan di ekotipe ini sangat tinggi, terutama ke pemukiman dan industri. Meskipun etnis Sunda masih dominan, namun berbagai etnis telah tinggal di ekotipe ini, terutama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri. Lebih dari separo kecamatan di ekotipe ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Bandung. Secara ekologis, tingkat pencemaran lingkungan (baik karena limbah industri maupun domestik) di ekotipe ini, sangat tinggi. Secara umum, perubahan sosial dari masyarakat yang semula berbudaya hidrolis ke masyarakat berbudaya industri dan atau dari masyarakat yang berbudaya pedesaan ke masyarakat yang berbudaya kota, berjalan sangat cepat di ekotipe ini.

### **3.2 Status Penguasaan dan atau Pengusahaan Lahan Usahatani**

Kabupaten Bandung yang terletak di zona ekologi Jawa Barat bagian tengah menampilkan pola pergeseran dan alih fungsi lahan pertanian yang sangat tinggi. Implikasinya, luas lahan pertanian semakin berkurang dan skala usahatani semakin menyempit. Penyempitan skala usaha terjadi karena involusi pertanian, baik melalui relasi pewarisan maupun fragmentasi lahan akibat relasi pengusahaan (sakap, maro, sewa, dan gadai). Hasil penelitian (**Tabel 3.1**) mengungkap bahwa persentase petani di Kabupaten Bandung yang berstatus sebagai penggarap atau penyakap lebih kecil 1,1 persen daripada petani pemilik penggarap. Kondisi tersebut mulai tidak konsisten dengan apa yang diungkapkan oleh **Collier et al., (1996)**, bahwa “di Jawa, institusi bagi hasil (sakap atau maro) menduduki posisi pertama dalam relasi pengusahaan lahan setelah pemilik penggarap”.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh **Geertz, Scott, Wiradi** dan **Makali, Hayami** dan **Khikucy, Soewardi**, dan ditegaskan oleh **Collier**,

tentang mayoritas petani Jawa yang berstatus sebagai penyakap atau penggarap tersebut ternyata bias lokasi, karena secara riil, hal tersebut hanya umum berlaku di zona agroekosistem sawah saja, sementara di zona agroekosistem lahan kering dan dataran tinggi tidak terbukti. Hal ini menegaskan pula bahwa jumlah petani yang berkinerja lemah relatif lebih banyak ditemukan di zona agroekosistem sawah.

Tabel 3.1. Kinerja Status Penguasaan Lahan, Luas Lahan Usahatani dan Pola Usahatani yang Diterapkan oleh Para Petani Pada Berbagai Zona Agroekosistem di Kabupaten Bandung.

Indikator Karakteristik Petani	Zona Agroekosistem									Kinerja Petani (N=90) Kabupaten Bandung (%)		
	Sawah Berbasis Padi			Lahan Kering Berbasis Palawija			Dataran Tinggi Berbasis Sayuran					
	N=30			N=30			N=30					
	Kinerja Petani (%)			Kinerja Petani (%)			Kinerja Petani (%)					
	K	M	L	K	M	L	K	M	L			
1. Status Penguasaan Lahan	30.0	0.0	70.0	53.3	33.3	13.3	40.0	36.7	23.3	38.9	23.3	37.8
2. Luas Lahan Usahatani	33.3	23.3	43.3	23.3	33.3	43.3	26.7	20.0	53.3	27.8	25.5	46.7
3. Pola Usahatani	10.0	3.3	86.7	76.7	23.3	0.0	63.3	36.7	0.0	50.0	21.1	28.9

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2004

Keterangan : K (Kuat), M (Moderat), L (Lemah)

Catatan : Berdasarkan hasil uji beda dengan T-Test, diketahui bahwa karakteristik petani antar zona agroekosistem berbeda nyata pada  $\alpha = 0,01$

Menurut **Sinaga dan White (1980)**, dan **Collier, et al., (1996)**, proses pengambilan keputusan petani penyakap atau penggarap untuk berpartisipasi dan menerapkan teknologi budidaya secara efektif, secara psikologis tidak penuh, karena dipengaruhi oleh mekanisme bagi hasil, bagi risiko, dan bagi tenaga yang cenderung memberatkan penyakap atau penggarap. Meskipun relasi penyakapan sudah menjadi semacam gejala *patron-client*, dan bahkan oleh **Collier dan Soentoro (1978)**, **Portes (1998)**, **Coleman (2000)**, dan **Krishna (2000)** dipandang sebagai institusi informal-rasional (*social capital*) yang memberikan jaminan kesejahteraan (*tradisional welfare institutions*), namun **Suhendar (1994)** mengungkapkan bahwa "posisi petani penyakap sangat rentan terutama berkaitan dengan perjanjian bagi hasil. Walaupun pada tahun 1960 telah dikeluarkan UU No.2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi tidak mampu memperkuat posisi petani penyakap menghadapi kekuatan pemilik tanah. Akibatnya, muncul beragam perlawanan dari para penyakap, seperti penggelapan hasil atau penggelembungan biaya usahatani.

Pada **Tabel 3.1**, terlihat bahwa petani di zona agroekosistem dataran tinggi yang berkinerja lemah hanya 23,3 persen, padahal menurut **Suhendar (1994)**, pada tahun 1957

terdapat sekitar 69 persen petani di Desa Cibodas yang berstatus tunakisma. Penurunan jumlah petani tunakisma di dataran tinggi diperkirakan terjadi karena tiga faktor, pertama usahatani di zona tersebut semakin dinamis, kedua menurunnya petani tunakisma karena migrasi ke sektor non pertanian, dan ketiga diterapkannya agribisnis berbasis komunitas (*community based*) melalui relasi penyakapan atau penggarapan lahan-lahan negara.

Berbeda dengan zona agroekosistem sawah, di zona agroekosistem lahan kering dan dataran tinggi, status pengusahaan lahan lebih didominasi oleh petani pemilik penggarap dan penyewa. Meningkatnya jumlah petani dengan kinerja lemah (menurut **Suhendar** tahun 1925 sebesar 66% dan sekarang 70%) di zona agroekosistem sawah sangat terkait dengan berkembangnya pemukiman dan industri. Angka penyakap meningkat karena sifat usahatani padi yang memberikan waktu luang banyak, menjaga keamanan atau ketahanan pangan rumah tangga, adanya berbagai bentuk bantuan lunak, dan menurunnya minat pemilik lahan untuk bertani. Meningkatnya penyakapan juga dipengaruhi oleh meningkatnya penguasaan lahan oleh orang-orang kota (*lahan guntai*). Menurut **Tjondronegoro (1990)** dan **Soewardi (1995)**, petani lebih suka menanam komoditas yang memberikan banyak kesempatan (waktu luang) atau dapat diusahakan secara santai (*ceb cul*). Dengan itu peluang mereka untuk bekerja di luar sektor pertanian semakin terbuka.

Secara sosiologis, **Wiradi** dan **Makali (1984)** mengungkapkan bahwa institusi penyakapan lebih disukai oleh petani karena sistem ini memungkinkan pemilik membagi risiko dengan penyakap dan sekaligus juga memberikan peluang untuk tetap memperoleh hasil dari sawahnya. Namun petani di dataran tinggi dan lahan kering lebih suka menyewakan lahan daripada menyakapkan, hal ini sangat terkait dengan mekanisme bagi hasil yang sulit dilakukan pada komoditas-komoditas di kedua zona tersebut. Akhir-akhir ini, relasi penyewaan dan penyakapan mulai langka dilakukan di dataran tinggi, terutama pasca digusurnya petani dari lahan-lahan konservasi.

Berbeda dengan di dataran tinggi, para petani padi di daerah kasus mengungkapkan bahwa jumlah petani pemilik penggarap cenderung terus menurun. Sekarang ini, pemilik lahan lebih tertarik untuk menyerahkan pengelolaan lahannya kepada para penyakap atau penggarap. Secara umum, relasi sakap terjadi antara kelas



lebih tinggi dengan kelas yang lebih rendah dalam stratifikasi petani. Ini merupakan kebalikan dari relasi sewa dan gadai.

Di zona agroekosistem sawah, relasi sakap ada yang secara sengaja diterapkan oleh para petani berlahan luas dengan tujuan untuk mengikat buruh tani yang keberadaannya semakin berkurang. Hal tersebut konsisten dengan temuan **Wiradi dan Makali (1984)** di Kecamatan Ciasem Subang. Secara praktis, pemilik lahan akan menyerahkan sebagian lahannya untuk disakap oleh petani gurem atau buruh tani, tentu dengan syarat penyakap tersebut harus siap untuk bekerjasama dan bekerja di majikannya, kapan saja. Menurut **Sitorus et al., (2001)**, secara sosial, meskipun bernuansa berbagai kemiskinan (*shared poverty*), namun relasi tersebut sangat humanis karena telah mengangkat satu tingkat derajat buruh tani ke stratifikasi yang lebih tinggi, yaitu penyakap. Dengan demikian, predikat buruh tani yang oleh sebagian besar masyarakat dipandang hina hingga membuat orang (termasuk orang tua) enggan untuk menyandangnya, tereliminasi. Alhasil, kelangkaan buruh tani pun dapat dihindari. Relasi sakap model ini sesungguhnya sudah jarang, karena menurut **Geertz (1963)** hanya tertancap dalam kemitraan sosial-ekonomi (*patron-client*).

Di zona agroekosistem sawah ditemukan pula petani penggarap yang menggarapkan lagi lahan garapannya kepada penggarap lainnya. Hal ini hanya dilakukan oleh petani penggarap yang mendapatkan kepercayaan (*trust*) dan lahan garapan luas. Gejala lain yang mendorong terus berkembangnya relasi penyakapan di zona agroekosistem sawah dan dataran tinggi adalah meningkatnya penguasaan dan pemilikan lahan oleh orang-orang kota. **Scott (1989)** menganalisis bahwa merasuknya kapitalisme dan komersialisasi merupakan ancaman bagi subsistensi dan mempercepat konversi lahan usahatani.

Sekarang ini, motivasi dari pemilik lahan untuk menerapkan relasi penyakapan cenderung didominasi oleh motif ekonomi. Para pemilik lahan menilai bahwa relasi tersebut lebih efisien, apalagi dengan semakin meningkatnya risiko usahatani. Para pemilik lahan berpendapat, meskipun hasil usahatani dibagi dua, namun biaya, tenaga, dan waktu menjadi lebih efisien. Berbeda dengan apa yang ditemukan **Bachtiar Rifai (1958)** tentang petani penyakap yang mempunyai tingkat kemakmuran lebih tinggi dan lebih stabil daripada golongan petani pemilik tanah dan pemilik penggarap. Posisi para

petani penggarap di Kabupaten Bandung justru lebih miskin, lemah, risiko yang harus ditanggungpun lebih berat ketimbang pemilik lahan. Bahkan beberapa penyakap harus menanggung hampir 100 persen risiko, kecuali pajak tanah. Ini jelas sangat memberatkan, apalagi sebagian besar dari mereka merupakan mantan buruh tani yang lemah dalam berbagai hal, seperti: modal yang kecil telah menyebabkan tidak optimalnya penggunaan sarana produksi pertanian; meskipun mereka giat dan penuh mengalokasikan waktunya di sawah, namun tetap setengah hati didalam menjalankan usahatani. Pemikiran "*untuk apa habis-habisan mengusahakan lahan orang lain, toh hasilnya dibagi dua*" muncul sebagai akibat dari tidak seimbangny pembagian kerja dan biaya dengan penghasilan; dan keputusan mereka tetap lemah karena tidak memiliki surat dan hak atas tanah, akibatnya sulit mengakses modal atau kredit ke lembaga keuangan formal seperti bank.

Bagi penyakap, UU No. 12/1992 tentang Kebebasan Mengusahakan Komoditas yang Bernilai Ekonomis Tinggi, belum tentu berlaku, karena keputusan tentang jenis komoditas apa yang akan diusahakan harus mendapatkan izin dari pemilik lahan, minimal didiskusikan. Secara riil, lemahnya status petani (penggarap) telah menyebabkan tidak efektifnya program *rice estate*, *corporate farming*, dan program lainnya. Meskipun **Mubyarto (1994)** mencatat bahwa dalam relasi sakap hampir tidak ada perselisihan, namun dengan semakin tidak seimbangny pembagian risiko, maka perlawanan-perlawanan yang bersifat terselubung mulai bermunculan, seperti dalam pembagian hasil, *mark-up* biaya pemupukan, dan sebagainya.

Kelembagaan penguasaan lahan (*land tenure system*) merefleksikan berbagai fenomena sosial. Kelembagaan ini banyak digunakan oleh para sosiolog untuk melihat ketimpangan-ketimpangan sosial, karena di banyak desa kelembagaan tersebut merefleksikan perbedaan-perbedaan akses antar kelompok masyarakat terhadap aset-aset produktif (**Esman, 1978**). Menurut **Borlagdan (1990)**, kelembagaan tersebut akan pula mempengaruhi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan. **Corcombe (1971)** menegaskan bahwa status penguasaan lahan berpengaruh terhadap perubahan usahatani dari subsistensi menjadi usaha yang berorientasi pasar. Pada ujungnya, kelembagaan penguasaan lahan akan berpengaruh juga terhadap efektivitas dan efisiensi penerapan inovasi. Menurut **Boeke (1953)**, menggarap sawah tidak dianggap sebagai kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan

tetapi sekedar untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Semangat petani penyakap jelas sangat berbeda dengan petani penyewa dan penggadai yang jelas-jelas bermotif ekonomi.

### 3.3 Luas Lahan Usahatani

Luas pemilikan lahan merupakan faktor penentu jumlah produksi, produktivitas, pendapatan, indikator kemiskinan, dan tingkat keberdayaan atau kesejahteraan suatu rumah tangga tani (Simatupang, 1989). Secara historis empiris, struktur agraria (skala pemilikan dan penguasaan lahan pertanian) di Jawa terus mengalami fragmentasi ke dalam lahan-lahan usahatani yang sempit sebagai akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk dan pewarisan (Boomgaard, 1985; Roel dan Zimmermann, 1989: 148-150). Mubyarto (1994) mengungkapkan bahwa skala usahatani yang sempit dan tercecèr (berserakan) bukan masalah luar biasa. Karena hal serupa ditemukan pula di Swiss, Denmark, Prancis, Irlandia, dan banyak negara lainnya.

Tabel 3.2. Kinerja Petani Pada Tiap-Tiap Zona Agroekosistem di Kabupaten Bandung Berdasarkan Luas Penguasaan Lahan, Tahun 2004.

LUAS LAHAN (Ha)	KINERJA PETANI	ZONA AGROEKOSISTEM						KABUPATEN BANDUNG	
		SAWAH		LADANG		D. TINGGI		(Orang)	(%)
		(Orang)	(%)	(Orang)	(%)	(Orang)	(%)		
≤ 0,5	Lemah	13	43,33	13	43,33	16	53,33	42	46,67
0,5 < Ha ≤ 1,0	Moderat	7	23,33	10	33,33	6	20,00	23	25,56
> 1,0	Kuat	10	33,33	7	23,33	8	26,67	25	27,78
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL LUAS LAHAN (Ha)</b>		<b>32,51</b>		<b>26,38</b>		<b>24,63</b>		<b>83,52</b>	
<b>RATAAN LUAS LAHAN (Ha)</b>		<b>1,08</b>		<b>0,88</b>		<b>0,82</b>		<b>0,93</b>	
<b>RANK LUAS LAHAN (Ha)</b>		<b>0,1 - 4,2</b>		<b>0,1 - 5,0</b>		<b>0,1 - 2,5</b>		<b>0,1 - 5,0</b>	
<b>MODUS (Ha)</b>		<b>0,2</b>		<b>0,14</b>		<b>0,3</b>		<b>1</b>	
<b>MEDIAN (Ha)</b>		<b>0,63</b>		<b>0,66</b>		<b>0,5</b>		<b>0,58</b>	

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2004

Ada dua faktor penyebab penyempitan, yaitu: 1) faktor geografis. Di daerah yang berbukit, perserakan lahan tidak dapat terhindarkan, karena lahan harus diatur dengan teras-teras atau sengkedan. Penelitian (Tabel 3.1) membuktikan bahwa petani di zona agroekosistem dataran tinggi (yang memiliki tingkat kemiringan lahan cukup tajam) menguasai lahan yang sempit-sempit, baik skala maupun petak-petaknya; dan 2) faktor

sosiol-ekonomi. Perpecahan lahan terjadi melalui sistem pewarisan. Fragmentasi ini terjadi karena anak-anak petani (pewaris) tidak mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian, akibatnya lahan warisan dibagi-bagi (dipecah) hingga jelas batas-batas kepemilikannya. Di sisi ekonomi, fragmentasi lahan juga terjadi akibat penjualan yang prosesnya dilakukan secara perlahan-lahan. Menurut **Scott (1993)**, di Malaysia, mekanisme pewarisan lahan pertanian telah diatur secara jelas, baik dengan norma sosial maupun hukum formal. Secara sosial, keutuhan lahan usahatani (skala dan penguasaannya) akan senantiasa dijaga oleh keluarga. Petani hanya akan mewariskan lahan usahatannya kepada ahli waris yang benar-benar bertani. Mereka yang tidak bertani dapat andil atau diberi ganti lahan dalam bentuk uang tunai. Secara historis, pendekatan serupa ada di Kabupaten Bandung, namun kadar modal sosial tersebut terus menurun (*degradation*). Kecenderungannya, tekanan penduduk dan melemahnya manajemen (etika sosial) pewarisan telah menyebabkan sempit dan terfragmentasinya lahan usahatani. Secara sosial, penguatan mekanisme atau kelembagaan pewarisan memungkinkan diterapkan di Indonesia, karena mekanisme pewarisan telah lama melembaga pada masyarakat Islam dan masyarakat adat.

Penelitian (**Tabel 3.1** dan **Tabel 3.2**) mengungkap bahwa 46,67 persen petani mengusahakan lahan kurang dari setengah hektar (kurang dari 350 bata). Hal ini konsisten dengan apa yang diungkapkan oleh **Hayami** dan **Khikucy, Geertz, Scott, Soewardi**, dan **Collier**, bahwa sebagian besar petani di Jawa berlahan sempit (kurang dari 0,5 ha) atau gurem (*peasant*). Secara kuantitatif angka tersebut relatif kecil, **Suhendar (1995)** mencatat bahwa tahun 1905 petani gurem berjumlah sekitar 67 persen dan tahun 2003 berjumlah 74,9 persen (**BPS, 2003**). Secara periodik, **Simatupang (1989)** menganalisis bahwa pada periode 1963-1973 proporsi petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha meningkat dari 43,6 persen menjadi 45,6 persen (**Tabel 3.3**). Secara umum, luas penguasaan atau pengusahaan lahan di daerah kasus berkisar antara 0,1 ha - 5,0 ha dengan rata-rata 0,93 ha. Satu hal yang menggembirakan, di Kabupaten Bandung terdapat sekitar 27,80 persen petani yang berkinerja kuat (menguasai lahan di atas 1,0 ha).

Jika dianalisis secara historis, ada kecenderungan, proporsi petani yang tergolong kelas menengah atau petani kaya (*larger comercial farm*) terus meningkat, yakni sekitar lima persen. Gejala ini dapat dijadikan sebagai dasar bahwa kemungkinan ke depan (jika

industrialisasi berjalan lancar) pertanian di Indonesia akan berkembang seperti di Belanda, Jerman dan Amerika Serikat. Jumlah petaninya semakin sedikit, tetapi penguasaan lahannya luas. Secara riil, gejala ini sudah nampak di dataran tinggi (seperti di Pangalengan Kabupaten Bandung). Petani kaya yang proporsinya hanya 10-15 persen menguasai lahan sekitar 75-80 persen. Sedangkan petani kecil yang proporsinya sekitar 85-90 persen menguasai lahan sekitar 20-25 persen. Namun sekarang ini, kelas petani kaya Indonesia belum tepat disebut sebagai *capitalism farm*, mungkin lebih tepat disebut sebagai petani *post-tradisional*. Jika mengutip istilah **Geertz (1963)**, maka tampak jelas bahwa sebagian besar petani di Kabupaten Bandung masuk dalam kategori berkinerja lemah (subsisten).

Tabel 3.3. Presentase Rumah Tangga Pertanian di Indonesia dan di Pulau Jawa Menurut Luas Lahan yang dikuasai pada Periode 1963-2003.

Luas Lahan Usahatani (Ha)	Indonesia					Pulau Jawa				
	1963	1973	1983	1993	2003	1963	1973	1983	1993	2003
	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani	% Usaha tani
< 0,5	43.6	45.6	40.8	48.5	51.5	52.0	55.0	54.0	69.8	74.9
0.5 – 0.99	26.5	24.7	25.0	22.4	27.7	27.0	26.0	27.0	-	-
> 1,0	29.9	29.7	34.2	29.1	20.8	20.0	19.0	19.0	-	-

Sumber: Sensus Pertanian BPS Tahun 1993 dan 2003

Secara faktual, ketimpangan struktur penguasaan lahan semakin tajam. Meskipun presentase rumah tangga tani yang menguasai lahan di atas satu hektar menurun, namun luas penguasaan lahannya cenderung tetap dan meluas. Pada Tabel 6.5 terlihat bahwa 20.8 persen rumah tangga pertanian yang menguasai lahan di atas satu hektar, ternyata menguasai 52 persen lahan pertanian. Pada kenyataannya, penguasaan lahan semakin terpolarisasi pada elit-elit desa (*capitalism farm*). Sensus Pertanian Tahun 2003 mengungkapkan bahwa 69 persen lahan usahatani dikuasai oleh 16 persen rumah tangga tani (Suhendar, 1998:107).

Jika dianalisis secara parsial, tampak adanya perubahan-perubahan. Di zona agroekosistem sawah yang bertopografi datar, luas kepemilikan lahan berkisar antara 0,1 ha – 4,2 ha. Adanya petani yang berlahan 0,1 ha menegaskan bahwa di zona tersebut terjadi penyempitan skala usaha dan petak-petak lahan, baik karena relasi pewarisan maupun penjualan bertahap. Di zona agroekosistem sawah (zona industri), memang terjadi konsolidasi lahan, namun dilakukan oleh para pemilik modal (bukan petani) dan

diperuntukkan bagi pembangunan pabrik dan infrastruktur lainnya. Sebaliknya, petani berlahan luas di zona agroekosistem dataran tinggi cenderung terus bertambah (26,7%) tetapi tidak untuk petak-petaknya (karena faktor topografinya yang miring). Hal ini terjadi karena petani kecil banyak yang melepas lahannya ke kelas petani di atasnya.

Pelepasan terjadi karena faktor tekno-ekonomi (usahatani tidak efisien) dan faktor sosio-ekonomi (kebutuhan biaya sekolah anak, modal kerja di sektor non pertanian, pewarisan, dan sebagainya). Hal tersebut konsisten dengan apa yang ditulis **Mubyarto (1994)**: “petani pemilik lahan yang sempit makin lama makin terlepas dari lahannya. Tanah tersebut pada akhirnya akan digadaikan, disewakan, dijual, dan atau diwariskan dalam petak-petak yang semakin sempit. Pada akhirnya petani menjadi penyakap atau buruh tani (*agricultural leader*)”.

Pelepasan bermula dari relasi sewa atau gadai antara petani kecil dengan petani kaya, karena petani kecil tidak memiliki modal untuk menebus lahannya, maka ia pun menjualnya. Menurut **Breman (1992:12)**, sewa dan gadai digunakan oleh petani kaya sebagai cara untuk mengumpulkan modal agar bisa membeli lebih banyak lahan pertanian. Akibatnya, luas lahan usahatani di desa-desa ada yang bertambah luas dan ada yang bertambah sempit. Hal ini konsisten dengan temuan **Collier et al., (1996)**, “lahan usahatani makin luas pada petani kaya dan semakin sempit pada petani kecil”. Meskipun sebagian petani berlahan luas ada juga yang menyempit karena terjadi fragmentasi akibat relasi pewarisan.

Di zona agroekosistem lahan kering berbasis palawija terjadi konsolidasi fisik lahan sehingga petak-petak lahan menjadi lebih luas. Konsolidasi lahan dilakukan seiring dengan digulirkannya program konservasi daerah aliran sungai (DAS) Citarik (anak sungai Citarum). Konsolidasi lahan bukan hal yang baru tetapi sudah berjalan sejak jaman kolonial. **Mears dan Moeljono (1985)** memaparkan bahwa “pada masa kolonial pendekatan pembangunan pertanian sekedar memperbaiki inputs untuk tanah, sedangkan pola pemilikan dan penguasaan tanah yang terbagi-bagi kedalam lahan-lahan kecil serta pada beberapa tempat lahan terkonsolidasi pada beberapa tangan, tidak diubah”.

Konsolidasi dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni konsolidasi fisik lahan, pemilikan, dan pengusahaan. Konsolidasi fisik lahan terjadi di zona agroekosistem lahan

kering berbasis palawija, konsolidasi pemilikan terjadi di zona agroekosistem dataran tinggi, dan konsolidasi perusahaan terjadi di zona agroekosistem sawah. Konsolidasi perusahaan ini masih bersifat semu (*pseudo*) karena digerakkan oleh pemerintah melalui program *rice estate* dan *corporate farming*.

Secara umum petani berlahan luas (berkinerja kuat) jumlahnya relatif sedikit (27,8%), namun status dan akses mereka atas berbagai sumberdaya produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang lainnya, kecuali untuk akses informasi. Terkait dengan akses petani, ada pergeseran dari apa yang diungkapkan oleh **Soewardi (1972)** tentang petani lapisan atas yang serba lebih dalam segala hal. Di zona agroekosistem sawah --yang rata-rata luas perusahaan lahannya mencapai 1,08 ha-- ditemukan 16,67 persen petani penyakap yang berlahan luas ( $\geq 1,0$  ha), namun akses mereka atas sumberdaya produktif tetap lemah, terutama informasi. Tesis **Soewardi** tersebut hanya berlaku bagi petani pemilik penggarap dan penyewa berlahan luas, itu pun hanya di zona agroekosistem sawah dan dataran tinggi.

Di zona agroekosistem lahan kering berbasis palawija, keserbalebihan itu lebih dominan melekat pada para pengurus kelompok, tetapi tidak berbanding lurus dengan luas kepemilikan atau perusahaan lahan. Geliat petani kelas menengah (umur, penguasaan lahan) yang kreatif, kosmopolit, dan inovatif, juga turut membiaskan pengkelasan sebagaimana di kemukakan **Soewardi**. Dilema masih tetap melekat pada petani kecil di berbagai zona agroekosistem. Meskipun petani kecil di dataran tinggi tidak lagi menampilkan ciri subsistensinya, namun itu hanya nampak pada teknologi dan orientasi usaha. Sementara nilai ekonomisnya sendiri masih tetap menampilkan karakter subsistensi. Menurut **Budi Rajab (2001:54-58)**, ketimpangan struktur agraria (kepemilikan dan perusahaan) ini masih menjadi faktor determinan dari kemiskinan, lemahnya akses dan kontrol mayoritas petani Indonesia.

**Collier et al., (1996:105-108)** memaparkan bahwa "lahan yang sempit dan tidak efisien telah mendorong petani kecil untuk bekerja di luar desa dan menyewakan lahannya". Pelepasan lahan dan penyewaan lahan (terutama di dataran tinggi) berjalan cepat sejalan dengan berkembangnya percaloan tanah dan lemahnya advokasi terhadap petani. Menurut **Sitorus et al., (2001:7)**, petani-petani (pemilik penggarap dan penyakap)

yang berlahan sempit lemah didalam manajemen usahatani. Akibatnya, posisi tawar (*bargaining position*) mereka di pasar menjadi lemah juga.

Kelemahan sisi agraria lainnya dari petani kecil yang perlu diwaspadai dan diadvokasi adalah mudarnya modal sosial agraria berupa ikatan, kemitraan, dan persahabatan petani dengan tanah. Tesis **Redfield (1985:95)** tentang petani yang memandang tanah sebagai pusaka (*heirloom land*) dan bukan mata dagangan (*commodity*), tampaknya mulai membias. Faktor harga dan mode produksi populis dalam usahatani (*komersialisasi pedesaan*) dan monetisasi pedesaan yang begitu intensif telah merubah pandangan petani dari keharmonisan hubungan (persahabatan) dan kasih sayang ke eksploitasi (pemerasan).

Implikasinya, petani-petani (terutama di zona sawah dan dataran tinggi) begitu mudah menjual lahan-lahan milik dan juga warisannya, terutama kepada pemilik modal bukan petani, seperti pengembang pemukiman, pengusaha hotel, golf dan industri. Meskipun pemerintah telah menetapkan rencana umum tata ruang dan wilayah, namun alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lain terus berjalan, termasuk di kawasan agropolitan. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh minimnya akumulasi kapital dari usahatani dan adanya konsolidasi kepemilikan lahan (membeli lahan di daerah produktif atau terdekat dengan menjual lahan yang jauh).

### **3.4 Pola Usahatani yang Diterapkan Petani**

Risiko dan ketidakpastian berusahatani menjadi bertambah kompleks pasca revolusi hijau (**Reijntjs, et al., 1999**). Meskipun kelembagaan pasar sudah berkembang pesat, namun fluktuasi harga tetap tinggi. Secara ekologis, intensipnya pembangunan fisik wilayah dan derasnya laju kerusakan lingkungan yang begitu nyata di Indonesia telah mengakibatkan berubahnya iklim mikro. Kapan dan berapa lama musim hujan dan musim kemarau akan berlangsung kini semakin sulit diprediksi. Serangan hama penyakit semakin intensif, luas, dan bervariasi sehingga sulit untuk diprediksi dan dikendalikan. Kecemasan petani semakin besar dengan munculnya hama penyakit baru yang masuk bersama komoditas impor dari negara-negara lain atau hasil mutasi. Kini risiko juga datang dari mekanisme pasar yang semakin terbuka (*globalisasi*).



Bagi para petani yang tidak terlalu berteori, perubahan-perubahan yang terjadi tidak terlalu dipikirkan, karena sejatinya mereka sangat pehitungan didalam menggerakkan usahatani. Sebagai seorang mahluk hidup yang berakal dan manajer usahatani, para petani senantiasa mengembangkan strategi adaptasinya. Menurut **Parson (1951)**, adaptasi merupakan persyaratan fungsional untuk melestarikan kehidupan sistem. Sedangkan masyarakat, bagaimana pun tingkatannya, merupakan suatu sistem (**Durkheim, 1964; Parsons, 1952**). Dengan demikian, untuk melestarikan kehidupan sistem dalam masyarakat, konsepsi adaptasi merupakan suatu keharusan bagi setiap sistem dalam masyarakat, untuk memiliki daya penyesuaian diri dalam menghadapi lingkungannya. Adaptasi dapat diterapkan pada bentuk kehidupan organik dan pada kehidupan sosial. Menurut **Adimihardja (1993)** manusia, kebudayaan dan lingkungan merupakan tiga faktor yang saling jalin menjalin secara integral, dan ketiganya sangat terkait dengan adaptasi. Lingkungan tempat manusia hidup, selain berupa lingkungan alam juga berupa lingkungan sosiobudayanya. Sehubungan dengan itu, maka konsep manusia harus dipahami sebagai mahluk yang bersifat '*biososiobudaya*'. Kaidah biologis menurut kemampuan organisme melalui penyesuaian diri terhadap lingkungan, berlaku pula untuk lingkungan sosiobudayanya. Adaptasi erat pula hubungannya dengan perilaku respon seseorang. **Hall (1964)** mengemukakan bahwa setiap respon seseorang merupakan akibat dari tiga hal, yaitu (1) Sifat organisme, (2) Pengalaman terdahulu, dan (3) Lingkungan yang sekarang. Proses adaptasi berhubungan dengan kemampuan yang melekat pada konstitusi fisik manusia seperti pemakaian alat dan bahasa. Demikian pula berkenaan dengan kehidupan sosial yang ditunjukkan oleh berfungsinya pola-pola kebudayaan sebagai kesatuan yang integral. Dalam pola-pola tersebut salah satunya adalah sikap terhadap nilai-nilai budaya bagi kehidupan sosial.

Perubahan-perubahan sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan, ekonomi dan kelembagaan yang terjadi direspon secara berbeda oleh para petani. Hasil penelitian (**Tabel 6.1**) mengungkap bahwa separo (50%) petani di Kabupaten Bandung menerapkan pola usahatani diversifikasi. Perlu berhati-hati didalam mendudukan konsep diversifikasi dalam duni pertanian, karena dibatasi oleh ruang dan waktu. *Pertama*, diversifikasi dimaknai sebagai usaha menanam beberapa jenis komoditas dalam satu lahan dalam waktu bersamaan (memanfaatkan ruang); *Kedua*, mengusahakan komoditas

yang berbeda pada lahan yang berbeda tetapi dilakukan dalam waktu yang sama; dan *Ketiga*, deversifikasi dimaknai sebagai usaha menanam beberapa jenis komoditas dalam lahan yang sama tetapi waktunya berlainan (memanfaatkan waktu atau pergiliran). Pola adaptasi yang terbilang baru sangat tampak di zona agroekosistem sawah, yakni adanya petani yang menerapkan pola diversifikasi (10,0%). Padahal, masyarakat yang sudah melekat dengan budaya *hidrolik* ini pada umumnya menerapkan pola usahatani monokultur (padi). Di Jepang, terutama di daerah padi sekitar Kyoto, diversifikasi atau rotasi tanaman pada lahan sawah merupakan hal yang biasa. Menurut **Arif (1995)**, di Jepang padi sawah dirotasikan dengan gandum, kacang-kacangan, dan tanaman semusim lainnya. Di Kabupaten Bandung, pengusahaan komoditas palawija dan sayuran di zona agroekosistem sawah, justru lebih banyak dilakukan pada lahan sawah beririgasi teknis yang diperuntukkan bagi usahatani padi. Beberapa komoditas yang didiversifikasikan di sawah adalah tomat, kacang panjang, timun, terung, tembakau, dan jagung.

Adaptasi baru (diversifikasi) yang diterapkan oleh beberapa petani sawah tersebut secara riil didasari oleh hal-hal sebagai berikut: berkembangnya orientasi komersial, diadopsinya teknologi pengendalian hama penyakit sintetis, kurangnya pasokan air bagi usahatani padi, banjir, memutus siklus hidup hama wereng (Inpres No. 3 tahun 1986), dan sebagainya. Secara eksplisit, tidak ada seorang pun petani yang mentautkan hal tersebut dengan **UU No. 12 Tahun 1992** tentang sistem budidaya tanaman. **Haeruman (1995)** menegaskan, pada usahatani yang skalanya relatif kecil, pola tanam juga ditujukan untuk menjaga kontinuitas pasokan. Secara filosofis **Pakih (2001)** dan **Pakpahan (2004)** menegaskan bahwa petani adalah tipikal manusia yang sangat gigih dan kreatif dalam menghadapi segala perubahan. Namun karena arus pemikiran dan kebijakan lingkungan eksternal seringkali mencelakakan petani, maka tidak jarang petani berjalan di luar "rel" yang dikehendaki pihak luar. Bagi pemerintah yang masih menjadikan beras sebagai komoditas politik, berkembangnya pola diversifikasi di agroekosistem sawah dapat dimaknai sebagai proses alih fungsi lahan yang dapat mengancam swasembada pangan (beras). Pada umumnya, adaptasi baru ini diterapkan oleh kelompok petani kelas menengah yang kosmopolit, relatif muda dan inovatif. Di zona agroekosistem sawah, beberapa petani masih mengusahakan sayuran tertentu (talas atau kacang-kacangan)

pada pematang, namun tidak ditemukan petani yang menerapkan pola tanam padi dan ikan (mina padi). Secara umum, pola tanam di zona agroekosistem sawah mulai tidak serempak, selain hal-hal di atas, kelangkaan buruh tani juga turut mempengaruhi kondisi tersebut. Pola tanam di zona agroekosistem sawah masih diatur oleh desa (intruksi), termasuk waktu menabur benih. Pola tanam di zona sawah dikatakan serempak apabila dalam waktu 21-30 hari seluruh petani selesai menanam.

Berbeda halnya dengan petani di zona agroekosistem sawah, di zona agroekosistem lahan kering dan dataran tinggi pola diversifikasi sudah melembaga atau umum diterapkan oleh para petani. Hal ini terjadi karena usahatani di kedua zona tersebut sangat dibatasi oleh faktor musim (air). Para petani di zona lahan kering berbasis palawija yang sangat menggantungkan pemenuhan pengairannya pada hujan, mengakui bahwa pola diversifikasi sudah menjadi tradisi (turun temurun). Mereka menanam komoditas yang beragam berdasarkan kecocokan lokasi, musim dan kecocokan tanaman untuk ditumpangsarikan. Di zona agroekosistem dataran tinggi, pola tanam yang diterapkan oleh para petani tidak hanya didasarkan pada kebiasaan tetapi juga permintaan pasar (perusahaan mitra). Sedangkan di zona agroekosistem lahan kering berbasis palawija, pola tanam lebih didasarkan pada kebiasaan dan keamanan pangan (subsistensi). Artinya, tradisi (kebiasaan) lebih mewarnai pola tanam dibandingkan dengan orientasi pasar. Memang ditemukan beberapa petani yang berorientasi pasar, seperti petani yang mengusahakan tembakau, namun proporsinya masih sedikit. Secara riil, belum ditemukan adanya komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi di zona agroekosistem lahan kering. Jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, dan cabe (*cengek*) merupakan komoditas yang banyak dikembangkan di zona lahan kering. Tomat sayur pernah dicoba dikembangkan di zona lahan kering melalui proyek OECF, namun gagal.

Zona Agroekosistem	Bulan dan Jenis Komoditas yang Diusahakan												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
Sawah Berbasis Padi	80%	Padi			Padi			Padi					
	20%	Padi dan Ikan			Padi dan Palawija			Bera					
Lahan Kering Berbasis Palawija	75%	Jagung, Kacang Tanah, Singkong, Cabe, dan lainnya			Kacang Merah ( <i>Moreka</i> ) Singkong			Bera					
	25%	Jagung, Tomat, Cabe, Tembakau, dan lainnya			Jagung, Kacang Merah, Singkong			Singkong					
Dataran Tinggi Berbasis Sayuran	20%	Tomat			30%	Tomat		20%	Tomat				
	35%	Brokoli/ Kentang			20%	Brokoli/ Kentang		30%	Brokoli/ Kentang				
	20%	Kubis Bunga			25%	Kubis		20%	Kubis				
	5%	Buncis			5%	Buncis		5%	Wortel				
	15%	Wortel			15%	Cabe		15%	Cabe				
	5%	Cabe dan Lain-Lain			5%	Lain-lain		10%	Lain-lain				

Gambar 3.1. Pola Tanam yang Diterapkan oleh Petani pada Berbagai Zona Agroekosistem di Kabupaten Bandung.

Komoditas	Bulan dan Jenis Komoditas yang Diusahakan												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1. Kubis Bung	Kubis Bunga												
2. Brokoli										Brokoli			
3. Kubis	Kubis												
4. Tomat									Tomat				
5. Kentang									Kentang				
6. Buncis					Buncis								
7. Tomat dan Brokoli	Tomat					Brokoli							

Gambar 3.2. Pola Tanam yang Diterapkan oleh Petani di Zona Agroekosistem Dataran Tinggi Kabupaten Bandung.

**Arif (1995)** menganalisis bahwa pola rotasi dan diversifikasi merupakan teknologi yang tepat, baik ditinjau dari segi agronomi, ekonomi, maupun pelestarian lingkungan. Pola ini dilakukan dimana pun di negara maju yang di Amerika dinamakan "*corn belt*" atau "*cotton belt*". **Arif** menegaskan bahwa petani di daerah diversifikasi dalam banyak hal menunjukkan ciri-ciri yang lebih berani dalam mengambil keputusan, aksesnya lebih tinggi, lebih seragam dalam mengenal lembaga pemasaran, menjadikan pasar sebagai sumber informasi dan lebih rasional daripada petani di daerah spesialisasi. Namun secara ekonomi, mereka tetap dikendalikan oleh pasar yang oligopsonik. Bahkan di dataran tinggi, para petani sudah sangat ketergantungan terhadap input luar dan inovasi dari luar. Pola diversifikasi juga membuat para petani menjadi sangat tidak terkendali di dalam

penggunaan input luar (eksploitatif). Dengan kemitraan, petani menjadi sangat didikte oleh perusahaan inti, dalam berbagai hal.

Secara teknis, pola tanam sangat terkait dengan luas kepemilikan lahan, lokasi lahan, dan status lahan. Menurut **Simatupang (1989)**, diversifikasi usahatani semakin meningkat dengan semakin luasnya lahan yang dikuasai. Mengacu pada struktur penguasaan lahan (**Tabel 3.3**), maka dapat disimpulkan bahwa persepek diversifikasi usahatani yang optimal tidak akan tercapai di Indonesia. Simatupang menegaskan bahwa diversifikasi ideal hanya dapat dilakukan pada lahan dengan luas minimal 0,5 ha. Artinya, usahatani perlu terspesialisasi. Tentu dengan pola teratur dan terpadu agar lahan tidak jenuh dan terjaga keberlanjutannya.

Pada umumnya, pertanian di daerah kajian sudah mengalami perubahan-perubahan ke arah penyesuaian dengan dinamika lingkungan yang lebih luas (pasar). Seperti halnya dalam pengaturan pola tanam, meskipun sebagian besar petani masih menggunakan pola tanam tradisional, namun sebagian petani (terutama petani maju) sudah mulai melakukan perencanaan-perencanaan dan perubahan pola tanam ke arah pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dikehendaki oleh pasar. Dinamika yang terjadi dalam sistem pertanian di daerah kajian tidak terlepas dari adanya relasi kemitraan antara petani dengan perusahaan agribisnis, supplier dan industri pengolahan. Secara tidak langsung, dinamika tersebut terjadi karena adanya peningkatan permintaan (jumlah, kualitas, dan kontinuitas) dari pasar modern, industri pengolahan, dan atau ekspor. Dinamika juga terlihat dari ragam komoditas yang diusahakan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, para petani tidak hanya mengusahakan komoditas-komoditas setempat, tetapi sudah mulai melirik komoditas-komoditas unggulan yang cenderung diminta oleh pasar, termasuk pasar modern. Beberapa komoditas yang diusahakan di dataran tinggi adalah brokoli varietas bejo, kubis bunga varietas cempaka, tomat varietas marta, kubis varietas green cornet, kentang varietas granola dan atlantic, cabe merah varietas TM 99, dan buncis varietas BR (lokal).

Komoditas yang diusahakan oleh petani di daerah kajian pada umumnya masih didasarkan atas kebiasaan, keguyuban dan kecocokan lokasi. Pada kenyataannya, hanya sedikit (15%) petani sayuran di daerah kajian yang sudah menerapkan perencanaan usahatani berdasarkan *trend* dan *demand* pasar. Pada kenyataannya, hanya sedikit petani

yang mengetahui jenis dan volume sayuran yang masuk ke supermarket. Petani yang mampu secara langsung memasok ke supermarket atau industri pengolahan hanyalah petani berlahan luas yang mengembangkan komoditas khusus (seperti kentang) dan petani besar yang merangkap sebagai bandar atau *supplier*. Secara kuantitatif, jumlah petani (baik petani murni maupun petani yang juga merangkap sebagai bandar) yang sudah mampu memasok ke pasar modern atau industri pengolahan masih sangat sedikit (2-5%). Sebagian besar produk yang masuk ke pasar modern di pasok oleh supplier yang sudah memiliki jaringan yang cukup permanen dengan tengkulak atau bandar tertentu di berbagai daerah.

Secara sosiologis, pertanian di daerah kajian belum terorganisasi, sehingga kuantitas produk masih cenderung bersifat musiman. Keadaan tersebut jelas tidak mampu menjamin kontinuitas dan kualitas permintaan pasar. Lemahnya kelembagaan petani dan menurunnya produktivitas lahan sebagai akibat penggunaan input kimia yang tinggi, juga turut mewarnai dinamika pertanian di daerah kajian. Di sisi lain, penguasaan dan pengusahaan lahan semakin sempit, sebagai akibat dari meningkatnya konversi lahan (terutama ke pemukiman), relasi pewarisan, dan penguasaan oleh orang luar daerah (guntai). Secara internal, pertanian mulai dihadapkan pada masalah tenaga kerja. Bahkan di beberapa sentra produksi pertanian, petani mulai mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara umum, struktur agraria di Kabupaten Bandung menampilkan kinerja yang didominasi oleh petani penggarap. Namun teridentifikasi adanya variasi antar zona agroekosistem. Di dataran tinggi struktur penguasaan dan pengusahaan lahan didominasi oleh petani pemilik dan penyewa, sedangkan di zona agroekosistem sawah didominasi oleh penggarap. Pada beragam zona agroekologi teridentifikasi adanya proses konsolidasi lahan namun berbeda orientasi dan peruntukannya.

Secara kultural, para petani di Kabupaten Bandung yang semakin dihadapkan pada kebutuhan dan permasalahan yang kompleks, serta sudah diterpa oleh corak budaya kota telah mengalami degradasi pada budaya agrariannya. Para petani telah tereduksi rasa cintanya terhadap lahan, sehingga dapat dengan mudah melepaskan lahan miliknya dan mengeksploitasinya dengan berbagai input kimia, pola usahatani intensif dan teknologi konvensional lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya advokasi dan pendampingan terhadap para pemilik lahan pada berbagai zona agroekosistem agar akses terhadap informasi agraria, akses terhadap informasi agraria, berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumberdaya lahan, sadar terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan pertanian, memahami dan memiliki perhitungan multidimensi dalam menjaga dan melepas lahannya, serta memiliki kelemagaan yang kuat.